

PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

**MUHAMMAD IQBAL
AHMAD TOHA NURDIN**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis f untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu aparat desa dan perwakilan masyarakat di Desa Jagabaya serta sampel diambil secara keseluruhan atau studi sensus, yaitu sebanyak 56 orang.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa Alokasi Dana Desa dapat digambarkan cukup baik, Sasaran Anggaran dapat digambarkan cukup baik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa dapat digambarkan cukup baik. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis verifikatif bahwa secara simultan maupun secara parsial Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 33,4% dan sisanya sebesar 66,6% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa tetapi tidak diteliti. Adapun secara parsial, Sasaran Anggaran lebih besar pengaruhnya daripada Alokasi Dana Desa.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penilaian kinerja pemerintahan desa secara umum bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan pada acuan terhadap indikator program-program tahunan pemerintah desa yang tersebar diseluruh kabupaten. Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan anggaran berbasis kinerja yaitu : "Sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang

optimal". Dengan demikian, pernyataan ahli ini mengisyaratkan bahwa setiap tujuan lembaga atau organisasi diukur dengan sajuhmana kemampuan dana baik yang telah dimiliki atau yang akan diterima dengan segenap kemampuan yang dimilikinya, dengan indikator ketercapaiannya.

Maka dari itu untuk melaksanakan pembangunan di desa, harus didasari oleh tujuan pemerintah itu sendiri yaitu peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan bahwa : "Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Dengan demikian untuk tercapainya tujuan berdasarkan amanat menteri ini, maka sangat penting mengelola dana desa dengan baik agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya manajemen keuangan atau manajemen dana yang tepat disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan di pelosok-pelosok desa setempat yang menyeluruh dan *universal*. Dalam konteks ini, pada prinsipnya program pembangunan desa dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dalam rangka penuntasan program-program tahunan yang perlu diselesaikan secara efektif. Sebagaimana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Bahri (2012) menyebutkan bahwa : "Langkah-langkah pokok dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu: penyusunan rencana strategi, penyesuaian, penyusunan kerangka acuan, perumusan atau penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja."

Dengan demikian kinerja pemerintahan desa dapat dikatakan baik apabila mampu merencanakan keuangan desa secara fokus dan terarah. Dana desa yang diperoleh harus dialokasikan terhadap hal-hal yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan masyarakat desa seperti pemberdayaan masyarakat dibidang apapun agar masyarakat dapat tersalurkan keahliannya disertai pembinaan kompetensi misalnya dibidang pertanian, *home industri*, jasa dan lain-lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini pula agar masyarakat desa merasakan adanya perhatian dari pemerintah dan berkurangnya pengangguran. Namun pada kenyataannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari kompas.com bahwa dampak positif peningkatan produktivitas yang dilakukan melalui transfer ke daerah serta dana desa dipertanyakan setelah jumlah penduduk miskin didapati masih jauh lebih banyak dari di perkotaan. Hal itu diketahui dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan Indonesia per Maret 2018 yang dikeluarkan pada Senin (16/7/2018). "Sekarang kan sudah ada dana desa, tetapi ketimpangan di desa makin meningkat. Ini contoh sudah dikasih duit, tapi ketimpangannya meningkat," kata peneliti *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* Ahmad Heri Firdaus saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (19/7/2018) pagi. BPS menyampaikan, persentase penduduk miskin per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau setara 25,95 juta orang. Jika dirinci, persentase penduduk miskin di kota 7,02 persen sementara di desa 13,20 persen. Ahmad memandang, program pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di desa sudah baik. Namun nyatanya kemiskinan tetap tinggi, sehingga disinyalir ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang menjadikannya tidak efektif atau tidak tepat sasaran. "Ini tanda pengelolaannya enggak baik. Kalau dilihat lagi, untuk masyarakat 20 persen golongan atas meningkat lebih tinggi dari masyarakat golongan bawah. Pertanyaannya, apakah uang ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir

**Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran
Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan
Cimaung Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal,
Ahmad Toha Nurdin**

orang yang punya akses ke elit-elit daerah," tutur Ahmad. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan tingginya tingkat kemiskinan di desa tetap jadi PR pemerintah. Disparitas jumlah penduduk miskin di desa dengan di kota salah satunya juga terjadi karena jumlah penduduk di suatu daerah yang berbeda, menyebabkan perhitungan penduduk miskin juga beragam. Suahasil mencontohkan, seperti Papua yang jumlah penduduknya sedikit tetapi tingkat kemiskinannya tinggi dan di Jawa yang jumlah penduduknya relatif banyak namun tingkat kemiskinannya rendah. (sumber:<https://ekonomi.kompas.com>. diakses 14 April 2019)

Kemudian penulis melansir informasi yang diperoleh dibidang pertanian dari Liputan6.com, Jakarta bahwa ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada UGM Gunawan Sumodiningrat menilai selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum memihak sepenuhnya kepada masyarakat di sektor pertanian. Meskipun pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk dana desa. Menurut dia, alokasi anggaran dalam APBN pemerintah lebih mengutamakan sektor industri ketimbang pertanian. Padahal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah sektor pertanian. "Ini tidak jelas, karena terlalu mendorong ke industri, tanpa memperhatikan rakyat," ujar dia di Kantor HKTI, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Dia menuturkan, dana desa yang digelontorkan pemerintah saat ini juga kurang menyentuh masyarakat pertanian. Dana desa yang dialokasi justru lebih banyak dikuasai oleh para kepala desa untuk kepentingannya. "Bantuan desa itu tidak efektif, karena konsepnya tidak jelas. Nomor satu, sadarkan di situ, bantuan desa adalah stimulan, bukan alat kampanye. Bantuan desa sudah dibuat 30 tahun lalu, ya gitu-gitu saja. Karena ganti pemerintahan ganti konsep. Pembangunan desa yang tidak membangun rakyatnya. Yang dibangun desanya, akhirnya yang dapat kepala desa, padahal bukan haknya. Akibatnya kepala desa masuk sekolah (penjara)," kata dia. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk lebih fokus mengembangkan sektor pertanian. Sebab untuk bisa menjadi bangsa yang kuat, Indonesia harus punya kemandirian di sektor pertanian. "Tidak ada orang hidup tanpa pertanian. Kita harus fokus ke petani. Menyadarkan rakyat harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Nomor satu adalah pendampingan. Supaya masyarakat bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarga, lingkungannya, baru menghidupi negaranya," ujar dia. Sebelumnya, Pemerintah dinilai masih harus memperbaiki sistem transfer daerah dan dana desa. Ini karena terdapat perbedaan data dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Anggota DPR-RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Achmad Hatari mengatakan ada perbedaan jumlah desa penerima dana desa dari data kedua instansi tersebut. "Sesungguhnya jumlah desa berapa? Kemendagri dan Kemenkeu 74,9 ribu desa. BPS 75 ribu desa. Selisihnya hampir 1.000," kata Hatari dalam rapat kerja Pemerintah bersama Banggar di Gedung DPR RI, Rabu 11 Juli 2018. Hatari juga meminta agar pemerintah lebih fokus terhadap tata kelola dana desa di wilayah Indonesia bagian Timur. "Saya tambah catatan terkait transfer daerah dan dana desa diharapkan pemerintah lebih konsentrasi atas tata kelolanya terutama di kawasan Indonesia Timur," jelas dia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang hadir dalam rapat tersebut menanggapi catatan dari DPR terkait transfer daerah dan dana desa tersebut. "Kami akan menyelidiki perbedaan data desa dari Kemendagri dan BPS. Kami gunakan data kemendagri sebanyak 74.957 desa," jelas Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan usulan dana desa langsung diteansfer ke kabupaten/kota oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemerintah daerah setempat. "Untuk masalah transfer karena diatur perda. Harapan pak Hatari agar

Menkeu langsung transfer ke kabupaten / kota, kami akan lihat aturan yang berlaku". (Dikutip hari senin tanggal 14 April 2019 dari: <https://www.liputan6.com>).

Berdasarkan informasi diatas, penulis dapat memahami bahwa alokasi dana desa di seluruh Indonesia masih belum efektif, serta sasaran anggaran yang belum jelas. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan di desa-desa belum akuntabel dan optimal. Sehingga asumsi penulis bahwa rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa ditentukan oleh belum optimalnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan sasaran anggaran. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono (Universitas Musamus Merauke) mengenai pengaruh sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperoleh hasil bahwa sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan pada instansi pemerintah di Merauke. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Anjarwati (2012) yang menyimpulkan bahwa sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Dalam hal ini penulis bermaksud meneliti sejauhmana kinerja pemerintahan desa akuntabel dengan penggunaan serta pengelolaan dana desa yang dinilai telah efektif atau belum, serta oleh ketepatan sasaran anggaran di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil observasi / pra survey di lapangan, bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung belum optimal, hal ini berdasarkan dimensi yang penulis ambil dari Mardiasmo (2009) mengenai pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu akuntabilitas hukum, kebijakan, proses, dan program, setelah diamati keempatnya belum terpenuhi secara optimal. Kemudian penulis mengamati pula mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dikelola dengan baik, berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012 : 119 – 120) seperti jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif dan intensitas yang akan dicapai, keempat indikator ini masih belum optimal. Selanjutnya sasaran anggaran setelah diamati belum optimal, yakni berdasarkan indikator sasaran anggaran yang dikemukakan oleh Ginting (2010) yaitu sasaran anggaran harus jelas, spesifik, dan dapat dipahami, namun setelah diamati hal tersebut masih jauh dari harapan.

Dengan demikian berdasarkan hal diatas tentang belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung yang belum optimal, penulis memiliki asumsi yang kuat bahwa disebabkan oleh belum optimalnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sasaran Anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung.
2. Bagaimana pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung.

3. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten / kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Kemudian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.2 Pengertian Sasaran Anggaran

Menurut Indra Bastian (2013:69) menyatakan bahwa : “Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.”

Menurut Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa : “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.”

Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa : “Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.”

Menurut Steers dan Porter dalam Putra (2013) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu :

1. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Selain itu, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak puas dan tidak tenang dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis dalam Putra,2013).

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa

Menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas yaitu : “Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.”

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) mengemukakan bahwa : “Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.”

Adapun kinerja berasal dari kata *performance*, kinerja dinyatakan sebagai prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Menurut Rivai dalam Muhammad Sandy (2015:12) memberikan pengertian bahwa : “Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.”

Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2012:95) yaitu : “Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.”

2.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian oleh Jurniadi,Djumadi, dan DB.Paranoan (2017) Universitas Mulawarman Samarinda, mengenai Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel- partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Penelitian oleh Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono (2015) Unisbank Semarang, mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke, hasil pengujian persial menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Merauke.
- c. Penelitian oleh Moh. Ikbal Babeng, Andi Pangerang Moentha dan Hamzah Halim (2018) Universitas Hasanuddin, mengenai Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, hasil penelitian bahwa implementasi pengguna ADD di rau Desa, Desa Dolom, dan Desa Talima B, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai tidak optimal seperti ketentuan

Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal, Ahmad Toha Nurdin

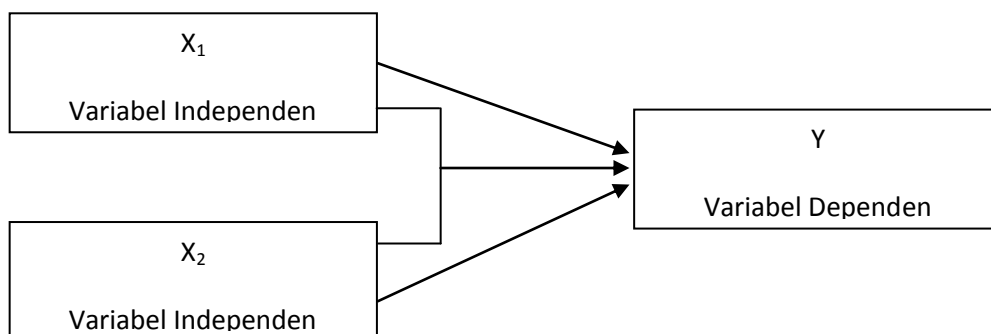
peraturan, ADD masih berorientasi pada pengembangan fisik fasilitas desa, sumber daya manusia masyarakat pedesaan, Faktor-faktor yang menghambat penggunaan ADD di Desa Ra'u, Desa Dolom, dan Desa Talima B di Kecamatan Bante Kabupaten, secara dominan dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia pemerintah desa.

pejabat dan penduduk desa, infrastruktur desa dan jarak atau lokasi geografis desa dari pusat ibu kota kabupaten Banggai sebagai pusat pemerintahan kabupaten sehingga akses ke informasi tentang pengelolaan dan penggunaan ADD oleh aparat desa adalah masih kurang optimal

III. METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah model penelitian deskriptif, dimana model penelitian ini menjelaskan kondisi yang ada pada masa sekarang atau dapat disebut mendeskriptifkan suatu gejala atau peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, model penelitian digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel X_1 dengan variabel Y baik secara parsial maupun simultan, sebab dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen serta satu variabel dependen. Adapun model penelitiannya adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Model Penelitian

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:215) dalam bukunya Statistika Untuk Penelitian mengemukakan bahwa : "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Penelitian ini menggunakan populasi yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RW dan RT.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:61) dalam bukunya Statistika Untuk Penelitian mengemukakan bahwa : "Sampel adalah sebagian dari populasi itu". Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan

sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu”. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 responden.

3.3 Metode Analisis

Dalam memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah perancangan untuk melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan. Adapun rancangan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear regresi berganda digunakan peneliti, bila peneliti ingin mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono (2012) bahwa : “Analisis regresi berganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) *variabel independen*, bila dua atau lebih *variabel independen* sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah *variabel independennya* minimal 2”.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Selanjutnya untuk menghitung nilai keeratan hubungan antar variabel, maka dihitung koefisien korelasi baik korelasi secara parsial antara variabel X_1 dengan Y , X_2 dengan Y maupun korelasi ganda antara variabel X_1 dan X_2 dengan Y ,

3. Analisis Koefisien Determinasi

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (%).

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

- a. Jika K_d mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- b. Jika K_d mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis menurut sugiyono diringkas sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa
Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :
 $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.
- b. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Sasaran Anggaran terhadap variabel terikat Laba Bersih
Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :
 $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa

Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal, Ahmad Toha Nurdin

c. Menentukan hipotesis silmultan variabel bebas Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif antara Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

$H_a : \beta_3 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif antara Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

d. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n-k-1, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

e. Menghitung nilai t_{hitung}

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah menggunakan program SPSS yang hasilnya dilihat pada tabel output hasil perhitungan regresi.

f. Menghitung nilai F_{hitung}

Untuk mencari nilai F_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah menggunakan program SPSS yang hasilnya dilihat pada tabel uji Anova^a.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)

2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien negatif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)

3. Jika nilai $F - Sig < \beta 0,5$ maka H_0 ditolak.

Hasil analisis dan pengujian hipotesis, tingkat signifikannya adalah 5% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95%, dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12219.413	4764.003		2.565	.013
1 Var_X1	.453	.159	.339	2.840	.006
Var_X2	.349	.114	.366	3.067	.003

a. Dependent Variable: Var_Y

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta dengan nilai 12219,413 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa adalah sebesar 12219,413.
- b. b_1 sebesar 0,453 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 0,453 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- c. b_2 sebesar 0,349 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sasaran Anggaran sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 0,349 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

2. Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 2
Hasil Uji Korelasi Product Moment

		Var_X1	Var_X2	Var_Y
Var_X1	Pearson Correlation	1	.344**	.465**
	Sig. (2-tailed)		.009	.000
	N	56	56	56
Var_X2	Pearson Correlation	.344**	1	.483**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000
	N	56	56	56
Var_Y	Pearson Correlation	.465**	.483**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil diatas maka :

- a. Korelasi antara Alokasi Dana Desa dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa adalah sebesar 0,465. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,40-0,599 mempunyai hubungan yang sedang. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.
- b. Korelasi antara Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa adalah sebesar 0,483. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,40 – 0,599 mempunyai hubungan yang sedang. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Sasaran Anggaran akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal, Ahmad Toha Nurdin

3. Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 3
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 ^a	.334	.309	5499.24174

a. Predictors: (Constant), Var_X2, Var_X1

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,334. Nilai R *Square* menunjukkan nilai Koefisien Determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,334 (33,4%). Artinya, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa dipengaruhi oleh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran sebesar 33,4%.

4. Analisis Uji Hipotesis : Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

a. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji-t dengan menggunakan software SPSS Versi 20 :

Tabel 4
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12219.413	4764.003		2.565	.013
1 Var_X1	.453	.159	.339	2.840	.006
Var_X2	.349	.114	.366	3.067	.003

a. Dependent Variable: Var_Y

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika t hitung < t tabel atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
- Jika t hitung > t tabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Dari tabel hasil uji-t diatas bahwa :

- 1). Nilai t-hitung untuk Alokasi Dana Desa (X_1) adalah 2,840, pada t tabel dengan dk 53 ($n-3 = 56-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,005 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-t sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Alokasi Dana Desa (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa (Y).
- 2). Nilai t-hitung untuk Sasaran Anggaran adalah 3,067, pada t tabel dengan dk 53 ($n-3 = 56-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,005 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai

signifikansi uji-t sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Sasaran Anggaran (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa (Y).

b. Uji Model (Uji F) Simultan

**Tabel 5
Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	805365032.128	2	402682516.064	13.315	.000 ^b
Residual	1602807966.730	53	30241659.750		
Total	2408172998.857	55			

a. Dependent Variable: Var_Y

b. Predictors: (Constant), Var_X2, Var_X1

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

- Jika f hitung < f tabel atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
- Jika f hitung > f tabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Dari tabel 4.26 dan hasil perhitungan diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 13,316 sedangkan F-tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 53 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 3,17 (lihat f-tabel pada lampiran). Karena F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-f sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Alokasi Dana Desa (X_1) dan Sasaran Anggaran (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa (Y).

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Parsial Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Pemerintah Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,453, yang artinya bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 0,453 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,363 berada pada nilai korelasi antara 0,20 – 0,399 mempunyai hubungan yang rendah. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung memiliki pengaruh yang signifikan karena t-hitung > t-tabel (2,840 > 2,005), pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Alokasi Dana Desa secara

Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal, Ahmad Toha Nurdin

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

2. Pengaruh Parsial Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa Pada Pemerintah Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,349, yang artinya bahwa setiap kenaikan Sasaran Anggaran sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 0,349 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,388 berada pada nilai korelasi antara 0,20 – 0,399 mempunyai hubungan yang rendah. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Sasaran Anggaran akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung memiliki pengaruh yang signifikan karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,067 > 2,005$), pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

3. Pengaruh Simultan Alokasi Dana Desa Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa Pada Pemerintah Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran secara simultan memiliki hubungan yang sedang dan positif dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi ganda sebesar 0,578 berada pada nilai korelasi antara 0,40 – 0,599, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 33,4% memiliki pengaruh yang sedang, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 66,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sistem Keuangan Desa, Manajemen Keuangan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa, Motivasi Kinerja Aparat Desa dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($13,316 > 3,17$) dan pada gambar kurva uji pihak kanan bahwa $f\text{-hitung}$ berada pada daerah penolakan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Alokasi Dana Desa (X_1) dan Sasaran Anggaran (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa (Y).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung dengan judul pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, maka pada bagian akhir dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Dengan demikian Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, artinya semakin tepat Alokasi Dana Desa maka akan semakin baik Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa demikian pula sebaliknya.
2. Sasaran Anggaran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Dengan demikian Sasaran Anggaran memberikan kontribusi positif dalam menentukan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung walaupun pengaruhnya kecil tetapi memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Apalagi variabel Sasaran Anggaran memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa daripada variabel Alokasi Dana Desa.
3. Secara simultan Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, yaitu hasil Uji-F bahwa F-Hitung lebih besar daripada F-Tabel serta berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian total pengaruhnya ditunjukkan oleh hasil Koefisien Determinasi (KD) sebesar 33,4%, dan sisanya yang merupakan variabel lain dan turut mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa tetapi tidak diteliti ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) sebesar 66,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sistem Keuangan Desa, Manajemen Keuangan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa, Motivasi Kinerja Aparat Desa dan lain sebagainya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa yang dilakukan di Pemerintah Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung, maka pada bagian akhir dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dengan demikian Alokasi Dana Desa merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Saran penulis, pihak desa harus selalu menjaga agar pengelolaan ADD lebih tepat guna, dan tepat sasaran, sebab pengaruhnya signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.
2. Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung,

Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal, Ahmad Toha Nurdin

dengan demikian Sasaran Anggaran di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung memberikan kontribusi positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Saran penulis, dengan demikian hal ini menjadi perhatian bagi pihak desa untuk menjaga agar anggaran sesuai dengan sasaran sesuai program, sebab pengaruhnya signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Apalagi variabel Sasaran Anggaran pengaruhnya paling besar daripada variabel lainnya yang diteliti.

3. Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung ditentukan oleh faktor Alokasi Dana Desa dan Sasaran Anggaran. Oleh karena itu agar Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa lebih baik dan optimal, maka Alokasi Dana Desa serta Sasaran Anggaran yang tepat sesuai program maka kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik serta akuntabel dengan ketepatan Alokasi dana Desa dan Sasaran Anggaran. Hal ini menjadi tugas seluruh komponen baik Kepala Desa maupun para Aparat Desa, serta diawasi penggunaannya oleh anggota BPD dan masyarakat di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

REFERENSI :

- Adisasmita, Raharjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anjarwati. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journ*
- Adnyana, Putra. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan. Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan
- Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono. 2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke
- Danim, Sudarwan. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ginting, R. 2010. Perancangan Produk. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurniadi, Djumadi, dan DB. Paranoan. 2017. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
- Khusufi, Syam, Muhammad. 2013. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Moh. Iqbal Babeng, Andi Pangerang Moentha dan Hamzah Halim. 2018. Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Moehariono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

Rizal Djalil. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jakarta. Rmbooks

Sandy, Muhammad. 2015. Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati. Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Tesis Universitas Widyatama Bandung.

Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.

<https://www.liputan6.com>

UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa